

PERAN ORGANISASI NON PEMERINTAH *HUMAN INITIATIVE* SUMATERA UTARA TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR KOTA MEDAN

Lina Wati^{1,*}, Misnen Ardiansyah², Himyar Pasrizal³

linawati.18.98@mail.com^{1,*}, misnen.ardiansyah@uin-suka.ac.id², himyarpasrizal@yahoo.co.id³

Universitas Sumatera Utara¹, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta², UIN Mahmud Yunus Batusangkar³

ABSTRACT

Success in development depends not only on a dynamic private sector and an efficient public sector but also on a robust civil society sector. The purpose of this research is to examine more deeply the role of the North Sumatra Human Initiative non-governmental organization for the economic empowerment of the coastal communities of Medan city, and to conduct a SWOT analysis (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) regarding the potential for economic empowerment of the coastal communities of the Medan city, then to formulate a policy strategy. It is suitable to be applied to a community empowerment program in the final stage to recommend strategic opportunities or potentials to be developed for HI North Sumatra. The research approach uses descriptive qualitative with the SWOT analysis technique to analyze data. The research results were obtained in the last two years, the North Sumatra Human Initiative NGO was supported by PT. Pertamina has organized an economic empowerment program for the coastal communities of Medan City. In line with this, the vision and mission of the Medan City government are to prioritize economic empowerment for coastal communities. Therefore, the Medan City Government, the private sector, and NGOs are expected to be able to construct the economic development of the Medan City community to become more advanced and prosperous.

Keywords: *Public Sector, Private Sector, Civil Society, SWOT, Empowerment*

ABSTRAK

Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada sektor swasta yang dinamis dan sektor publik yang efisien, tetapi juga pada sektor masyarakat sipil yang kuat. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji lebih dalam terkait peran organisasi non pemerintah *human initiative* sumatera utara terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir kota medan, dan melakukan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*) terkait potensi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir kota Medan, kemudian merumuskan strategi kebijakan yang tepat untuk diaplikasikan menjadi program pemberdayaan masyarakat, pada tahap akhir dalah merekomendasikan peluang atau potensi yang strategis untuk dikembangkan kepada HI Sumut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan tekhnin analisis data analisis SWOT. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa dalam kurun waktu dua tahun terakhir, LSM *Human Initiative* Sumut didukung oleh PT. Pertamina telah menyelenggarakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Kota Medan. Selaras dengan hal tersebut, visi misi pemerintah Kota Medan adalah memprioritaskan pemberdayaan ekonomi pada masyarakat pesisir. Maka dari itu, Pemerintah Kota Medan, Swasta, dan LSM, diharapkan dapat mengonstruksi pembangunan ekonomi masyarakat Kota Medan menjadi lebih maju dan sejahtera.

Kata Kunci: Sektor Publik, Sektor Swasta, Masyarakat Sipil, SWOT, Pemberdayaan

*Corresponding Author

Pendahuluan

Kemiskinan menjadi isu dan permasalahan di seluruh dunia, sehingga menjadi prioritas pertama dalam agenda *Sustainable Development Goals* (SDG's). Angka kemiskinan Indonesia pada September 2021 adalah sebesar 9.71% dan kota Medan sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia memiliki persentase kemiskinan sebesar 8.34% (BPS, 2022). Persentase kemiskinan tertinggi diduduki oleh tiga wilayah kecamatan yakni; kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan dan Medan Marelan, dan ketiga wilayah tersebut notabene-nya adalah wilayah pesisir kota Medan. Artinya, wilayah pesisir menyumbang persentase angka kemiskinan yang lebih banyak dibandingkan dengan wilayah lainnya di kota Medan.

Secara normatif, masyarakat pesisir seharusnya merupakan masyarakat yang sejahtera mengingat besarnya potensi sumber daya alam laut dan pesisir yang tersedia. Namun kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat pesisir tergolong kedalam masyarakat yang tertinggal, misalnya seperti nelayan. Fenomena ini cukup kontradiktif, karena perbandingan antara potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia yang sangat berlimpah tetapi, justru masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari sektor kelautan terkategori sebagai masyarakat miskin (Andreas & Savitri, 2016).

Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 disebutkan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi (SDA) Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa (DPRRI, 2007). Kemudian, wilayah Indonesia didominasi oleh kawasan perairan dengan cakupan air tawar diperkirakan \pm 55 juta hektar yang terdiri dari sungai seluas 11,95 juta hektar, danau alami dan buatan seluas 2,1 juta hektar yang semuanya telah terkandung berbagai jenis ikan, tumbuhan air, hewan air dan sebagainya, dimana perairan dan manfaatnya dapat dijadikan sebagai modal dasar pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat (Idrus et al, 2018). Persentase angka tersebut belum lagi ditambah dengan cakupan wilayah kelautan.

Secara teoritis masyarakat pesisir didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal dan melakukan aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Namun demikian, secara luas masyarakat pesisir dapat pula didefinisikan sebagai masyarakat yang tinggal secara spasial diwilayah pesisir tanpa mempertimbangkan apakah mereka memiliki aktivitas sosial ekonomi yang terkait dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan (Lomboan et al., 2021).

Pemberdayaan adalah bagian dari paradigma pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya, mulai dari aspek intelektual (Sumber Daya Manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial (Sutarto, 2018). Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dipandang sangat penting untuk mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha masyarakat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan (Phoek, 2021). Sesuai dalam amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 bahwa wilayah pesisir perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma

hukum nasional.

Jika dibandingkan antara potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah pesisir dan pantai sangat timpang, seharusnya masyarakat pesisir lebih sejahtera jika dibandingkan dengan kenyataan yang ada sekarang ini. Di wilayah pesisir banyak kantong kemiskinan, dan kesejahteraan yang tidak merata, banyak faktor yang harus diselesaikan, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat yang masih minim jika dibandingkan dengan wilayah non pesisir (Idrus *et al*, 2018). Program PEMP bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya meliputi aspek ekonomi (lapangan kerja dan pendapatan) tetapi juga meliputi aspek sosial (pendidikan, kesehatan dan agama), aspek lingkungan sumberdaya perikanan dan laut serta aspek pemukiman dan infrastruktur (Subagiana *et al*, 2018).

Dibutuhkan kolaborasi antar berbagai kalangan (pasar, negara dan masyarakat sipil) untuk mengoptimalkan upaya pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir. LSM Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau yang sering disebut *Non Government Organizations* (NGO) adalah salah satu elemen masyarakat sipil, menurut Clark masyarakat sipil dipandang sebagai organisasi non profit yang terlibat dalam pembangunan sosial ekonomi masyarakat (Dahie, 2019).

Human Initiative sebagai salah satu LSM di kota Medan yang aktif dan progresif, memiliki tiga program besar yakni; *initiative for children*, *initiative for empowerment*, dan *initiative for disaster*. Dan pemberdayaan ekonomi, bersama dengan air, sanitasi dan energi dan kesehatan, nutrisi dan ketahanan pangan merupakan bagian dari program *initiative for empowerment*. *Human Initiative* telah berkiprah sejak tahun 1999, dan pada tahun 2008 terdaftar di perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai NGO dengan *Special Consultative Status with the Economic Social Council*. Pada mulanya *Human Initiative* beroperasi sebagai lembaga zakat nasional tetapi, pada tahun 2008 berubah menjadi NGO, dan sejak tahun 2012 setelah terbut Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat maka berubahlah tata kelola organisasi secara internal. Dan selama 23 tahun berkiprah *Human Initiative* telah banyak meraih prestasi dan penghargaan salah satu diantaranya adalah "*The Best Humanitarian NGO*" oleh *Union NGOs of Islamic World (UNIW)* pada tahun 2011. Sebagai NGO yang aktif dan tanggap terhadap berbagai permasalahan maupun fenomena tertentu di kota Medan, maka kemudian yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana peran *Human Initiative* dalam mengatasi permasalahan masyarakat pesisir khususnya isu kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat (Initiative, 2020).

Beberapa penelitian yang mendukung diskusi mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir adalah penelitian Idrus *et al* (2018), disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat pesisir sangat penting untuk dilakukan, mengingat 80% penduduk Indonesia terdiri dari petani dan nelayan, keberhasilan pembangunan di wilayah pesisir akan berdampak pada pembangunan ekonomi dalam berbagai aspek, baik lanskap mikro maupun makro, dan ini akan tercapai bila ada dukungan dari pemerintah, pihak swasta, akademisi, LSM, dan semua *stakeholder* terkait. Bersambung dengan penjelasan di atas Rukin (2022), dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat ekonomi pesisir masyarakat masih tergolong rendah karena masih ada banyak orang yang berada digaris kemiskinan dan hampir miskin, masyarakat kurang mampu memahami usaha dan peluang yang ada karena kurangnya pembinaan dari pihak pemerintah, perlu pembinaan kewirausahaan dari pihak pemerintah dan sektor swasta.

Penelitian yang dilakukan oleh Phoek (2021), menjelaskan bahwa hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa faktor dengan prioritas tertinggi dalam strategi

pemberdayaan masyarakat pesisir di Kabupaten Merauke adalah komponen peningkatan produktivitas nelayan, kemudian dilanjutkan dengan komponen peningkatan peran bantuan permodalan dan intervensi pasar, yang kesemuanya bermuara pada pengembangan keterampilan nelayan untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan nilai jual. Faktor penghambat yang dialami masyarakat pesisir adalah rendahnya sumber daya manusia dan kemampuan masyarakat untuk mendapatkan bantuan kredit usaha, kurangnya dana pemerintah untuk mendukung usaha masyarakat pesisir. Selanjutnya, Setiabudi *et al* (2018), melakukan analisis data melalui monitoring dan evaluasi, terungkap bahwa masyarakat nelayan menganggap program pemberdayaan yang telah berjalan di Desa Saramaake Kabupaten Halmahera bermanfaat bagi nelayan (100%), termasuk manfaat keterampilan (92%). Program ini juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh nelayan (92%). Melalui kegiatan ini, para nelayan dapat lebih mampu dalam mengelola usahanya mandiri.

Berbeda dengan penelitian Rostin (2016), berdasarkan hasil pengujian tidak terdapat pengaruh langsung yang signifikan pemberdayaan terhadap kesejahteraan sebesar 0.097 atau 9,7 persen tetapi, modal sosial berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan. Dan tidak terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan antara kesejahteraan terhadap pemberdayaan melalui modal sosial sebesar 0.214 atau 21.4 persen. Dengan demikian, pengaruh pemberdayaan terhadap kesejahteraan total terhadap mencapai 0,311 atau 31,1 persen.

Beberapa penelitian yang mendukung terkait diskusi NGO (*Non Government Organizations*) dan peranannya terhadap pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut: penelitian yang dilakukan oleh Osiobe *et al* (2019), menunjukkan betapa responsifnya LSM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di masyarakat. Hasil selanjutnya menunjukkan bahwa keterlibatan LSM dalam masyarakat di mana warga negara yang terlayani oleh industri keuangan, pendidikan, kewirausahaan, politik, dan kesehatan memiliki distribusi normal. Sejalan dengan penelitian Roy *et al* (2017), ditemukan bahwa LSM di Bangladesh telah muncul sebagai penyelamat bagi banyak orang yang tidak memiliki makanan, pakaian, pendidikan dan fasilitas kesehatan dasar. Bangladesh adalah salah satu dari tiga belas negara paling miskin. Oleh karena itu LSM di Bangladesh dapat terus memainkan peran sebagai katalisator dalam pencapaian pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bekerja sama dengan pemerintah. Hal ini juga di dukung oleh penelitian Badawi dan Abdullah (2022), yang menjelaskan bahwa LSM di Alexandria, Mesir, memainkan peran penting dalam manajemen bencana, pengembangan masyarakat, bantuan kemanusiaan, dan mengurangi kemiskinan dengan moneter ekonomi jangka panjang dan menghasilkan keuntungan di Alexandria.

Bertolak belakang dengan penelitian Nega dan Schneider (2014), yang menyatakan bahwa LSM di Afrika terbukti tidak mampu menjadi penggerak pembangunan ekonomi karena masalah-masalah yang menyertainya. Namun demikian, LSM dan wirausahawan sosial dapat memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi. Mereka dapat menjadi generator pendekatan dan ide baru yang sangat efektif, yang kemudian dapat ditingkatkan ketika bermitra dengan negara yang efisien dan tidak korup. Afrika membutuhkan ide-ide baru yang dihasilkan oleh orang-orang yang kreatif dan berorientasi komunitas. Namun, beberapa tahun setelah ini, LSM di Afrika bereformasi menjadi lebih baik sebagaimana yang dinyatakan dalam penelitian Mlambo *et al* (2021), bahwa LSM memainkan peran penting dalam penyediaan berbagai layanan. Kebangkitan LSM di Afrika dilatarbelakangi oleh kegagalan baik

negara maupun sektor swasta untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin. Di Afrika Selatan, LSM muncul ketika pemerintah apartheid tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin (mayoritas kulit hitam). Peran NGO di Afrika Selatan tidak hanya terbatas pada penyampaian layanan tetapi juga dalam melawan pemerintah apartheid (menuntut demokrasi). LSM ada karena berbagai alasan dan sangat penting di Afrika Selatan pasca-1994. Namun, dalam perannya LSM menghadapi tantangan, meliputi terbatas pada pendanaan, kurangnya dukungan pemerintah dan kelangkaan sumber daya, strategi pembangunan harus fokus pada swadaya karena penyakit sosial utama seperti kemiskinan dan pengangguran masih ada.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait **“Peran Organisasi Non Pemerintah *Human Initiative Sumatera Utara Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kota Medan*”**. Adapun, perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah terkait sektor pemberdayaan masyarakat, bagaimana peran dan kontribusi LSM pada pembangunan ekonomi masyarakat pesisir kota Medan, yang notabene-nya adalah masyarakat termiskin.

KAJIAN TEORI

Teori Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP)

Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara lestari. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan (DPRRI, 2007): antara Pemerintah dan Pemerintah, Daerah antar-Pemerintah Daerah, antar sektor, antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat, antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen.

Bryant & white menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin. Cara dengan menciptakan mekanisme dari dalam (*build-in*) untuk meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adil, yakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan segenap upaya yang dapat dikonsentrasikan pada aspek-aspek ekonomi (Andreas & Savitri, 2016).

PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) adalah salah satu model pemberdayaan masyarakat pesisir yang telah dikembangkan secara nasional oleh pemerintah. Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat pesisir yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif dalam memprioritaskan kebutuhan masyarakat dalam alokasi anggaran sehingga mampu memanfaatkan potensi yang dimilikinya (Pariangu, 2020).

Lembaga Swadaya Masyarakat

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah kelompok dan lembaga yang seluruhnya atau sebagian besar independen dari pemerintah yang terutama memiliki tujuan kemanusiaan atau kooperatif daripada komersial. Mereka adalah lembaga-lembaga yang mendukung pembangunan internasional, kelompok masyarakat adat

yang terorganisir secara regional atau nasional dan anggota-kelompok di desa-desa. LSM termasuk asosiasi amal dan keagamaan yang memobilisasi dana swasta untuk pembangunan, mendistribusikan makanan dan layanan (Enyioko, 2013).

Ciri yang menonjol di negara-negara berkembang era pasca-kolonial mengidentifikasi LSM untuk fokus pada pembangunan manusia yang terintegrasi dan mendorong partisipasi publik. LSM berupaya menyediakan layanan yang tidak dapat dilakukan oleh pemerintah karena sumber daya yang dibutuhkan. LSM terkadang menangani kebutuhan sosial yang biasanya tidak menjadi perhatian pemerintah. Namun, dalam beberapa kasus, kebutuhan yang ditangani oleh LSM biasanya adalah kebutuhan yang harus ditangani oleh pemerintah. LSM mencakup berbagai organisasi dari kecil hingga besar, dari lokal hingga internasional dan dari kelompok advokasi hingga pelaksana proyek (Mlambo et al., 2021)

Organisasi non-pemerintah (LSM) dan wirausahawan sosial, bersama dengan badan amal dan pembangunan, adalah entitas yang bermaksud baik yang sering meningkatkan kehidupan orang-orang di komunitas miskin. Padahal LSM dan wirausahawan sosial dapat memainkan peran penting dalam proses pembangunan dengan memfasilitasi penciptaan organisasi seimbang, produktif, berpusat pada masyarakat yang dibangun di atas budaya dan institusi lokal. Namun, hingga saat ini, LSM dan wirausahawan sosial belum mencapai jenis transformasi struktural yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi yang sebenarnya (Nega & Schneider, 2014).

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif (penjabaran mengenai topik permasalahan secara terstruktur dan logis). Dalam melakukan analisis data, teknik analisis yang digunakan adalah analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*). Untuk mengetahui dan menyusun strategi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir melalui pemetaan dan analisis mengenai IFAS (*Internal Strategic Factors Analysis Summary*) serta EFAS (*External Strategic Factors Analysis Summary*). Sumber data penelitian diperoleh dengan wawancara terhadap pengelola *Human Initiative* Sumatera Utara yang bertempat di kota Medan, serta kepada pemerintah tingkat kelurahan dan kecamatan, pada Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peran *Human Initiative* Sumatera Utara Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kota Medan

Human Initiative adalah organisasi kemanusiaan yang telah berdiri sejak 10 Desember 1999, dan mengawali debut sebagai NGO (*Non Government Organisations*) sejak tahun 2008, sebelumnya *Human Initiative* berkiprah sebagai (LAZNAS) Lembaga Amil Zakat Nasional. *Human Initiative* berfokus pada tiga *core program* yaitu: pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak, dan manajemen kebencanaan dan tanggap darurat. *Human Initiative* memiliki wilayah operasi 13 cabang di dalam negeri dan 3 cabang di luar negeri serta memiliki representatif di 13 negara. Saat ini terdapat lima program pemberdayaan yang sedang dikelola oleh *Human Initiative* Sumut tiga diantaranya berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, dan dua diantaranya bertempat di pesisir kota Medan. Berikut adalah program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir kota Medan yang dikelola *Human Initiative* Sumut:

Pemberdayaan ekonomi masyarakat Belawan Bahari di Kecamatan Medan Belawan, yaitu bentuk program pemberdayaan ibu-ibu posyandu yang dilatih untuk

mengelola hasil kelautan seperti: bakso ikan, nugget ikan, amplang dan abon. Setiap program pemberdayaan dikelola atau didampingi oleh satu orang *officer*. Program ini terdiri dari satu kelompok usaha yang beranggotakan sebanyak sembilan orang dan telah dimulai sejak 2021-sekarang.

Pemberdayaan ekonomi Belawan Bahari berawal dari pembinaan ibu-ibu posyandu, dan sejak tahun 2022 mulai difokuskan menjadi program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Sebelum memulai program ini, masyarakat diedukasi terlebih dahulu dalam bentuk workshop untuk mengenalkan bagaimana konsep pemberdayaan ekonomi secara komprehensif. Selain diedukasi juga di latih secara praktis terkait pembuatan produk tertentu seperti bakso ikan, kerupuk amplang dan lain sebagainya. Rencana kedepan kawasan Belawan Bahari tidak hanya sebagai tempat berlalu lintas masyarakat, tetapi juga tempat wisata yang dikunjungi banyak orang, karena wilayahnya strategis dan potensial. Akan dibangun sarana berwisata kuliner seperti rumah makan terapung yang menawarkan masakan khas dari olahan-olahan laut. Selain itu, disediakan wahana untuk berkeliling areal perumahan apung nelayan dengan sensasi naik sampan kecil. Hal ini masih dalam tahap proses pembangunan, harapannya rencana ini dapat terealisasi dengan baik dan menimbulkan multiplier efek terhadap ekonomi masyarakat pesisir.

Pengelolaan usaha bengkel milenial dan doorsmeer di Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Program ini juga dikelola atau didampingi oleh satu orang *officer*, dan terdiri dari satu kelompok usaha yang beranggotakan enam orang. Periode program sudah dimulai sejak 2020-sekarang.

Konsep pemberdayaan yang dijalankan oleh HI Sumut berbasis kemitraan dengan korporasi atau BUMN, kerja sama yang diberikan adalah dalam bentuk bantuan dana program yang diberikan kepada HI Sumut untuk dikelola. Maka dari itu, rentang waktu pelaksanaan program tergantung pada kesepakatan dengan korporasi atau BUMN yang bersangkutan. Sejauh ini mitra yang mendukung program pemberdayaan HI Sumut adalah PT Pertamina. Adapun, pilihan jangka waktu program pemberdayaan yang ditargetkan HI Sumut adalah minimal 3 tahun dan maksimal 5 tahun. Hal ini dikarenakan manfaat atau dampak program pemberdayaan tidak bisa langsung terlihat, melainkan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam prosesnya.

Hal yang melatarbelakangi HI Sumut membuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir adalah konsep kemitraan yang diterapkan oleh HI, sehingga realisasi program adalah *base on donor*, artinya objek pemberdayaan yang sedang digarap dalam hal ini masyarakat pesisir adalah berdasarkan permintaan donatur yaitu PT Pertamina. Dan karena PT Pertamina memiliki proper hijau menuju emas maka PT Pertamina memiliki tanggung jawab untuk membantu terwujudnya pembangunan ekonomi di wilayah sekelilingnya (cakupannya bisa sampai sejauh 50 KM) dan melalui dana CSR (*Corporate Social Responsibility*).

Berdasarkan wawancara dengan staf program pemberdayaan, maka diperoleh informasi bahwa program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan pada masyarakat di wilayah pesisir jauh lebih menantang dibandingkan dengan wilayah lainnya seperti di wilayah pegunungan, dan lain sebagainya. Menurut beliau, struktur masyarakat pesisir berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Masyarakat pesisir terbiasa dengan proses yang instan untuk memperoleh pendapatan, sehingga tantangan yang muncul dalam mengikuti program pemberdayaan adalah tidak bisa sabar dengan rangkaian proses yang harus ditempuh. Karakteristik masyarakatnya cenderung santai dan tidak gigih serta visioner, sehingga harus ada edukasi terhadap masyarakat sebelum dan sembari berjalan program pemberdayaan.

Realiasi program pemberdayaan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang ditargetkan serta tetap mengacu pada LFA (*Logical Framework Analysis*). Beberapa program masih belum terlihat keberhasilan atau dampak programnya karena rata-rata program masih berjalan memasuki tahun kedua. Kendala pelaksanaan program pemberdayaan juga disebabkan oleh sikap demotivasi masyarakat, masyarakat merasa tidak mampu dan tidak berdaya. Selain itu juga ketidakpercayaan pada para pemberdaya program yang mungkin memiliki usia yang lebih muda daripada si pengelola. Kendala selanjutnya adalah stakeholder yang kurang mendukung, seperti lurah atau pejabat pemerintah lainnya sehingga mempersulit izin atau akses pelaksanaan program.

Faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kota Medan (SWOT Analysis)

Kecamatan Medan Belawan secara geografis adalah kawasan pemukiman dan perikanan dengan luas wilayah sekitar 21,8 km². Berikut adalah faktor kekuatan yang terdapat pada Kecamatan Medan Belawan:

Tabel. 1
Kekuatan (Strength)
Faktor Internal

No	Kekuatan (Strength)	Bobot	Rating	(B)x(R)
1.	Memiliki sumber penghasilan utama berupa tangkapan hasil laut yang besar	0.10	4.00	0.40
2.	Wisata kuliner potensial untuk berkembang dengan pesat seperti: Belawan <i>Seafood</i> , Muara <i>Seafood</i> , dan yang lainnya	0.05	3.00	0.15
3.	Mayoritas warga Medan Belawan berprofesi sebagai nelayan, pedagang, penyedia jasa, dan yang lainnya	0.05	2.00	0.10
4.	Masyarakat mendapatkan program-program pemberdayaan ekonomi baik dari LSM, Pemko maupun Instansi tertentu	0.08	3.00	0.24
5.	Potensi UMKM cukup strategis untuk di kembangkan di wilayah Belawan II dan Belawan Bahagia karena terdapat sentra ekonomi berupa pasar tempat berkembangnya potensi UMKM, yakni pasar Kapuas dan pasar Bahagia	0.06	2.00	0.12
6.	Belawan Bahari juga menjadi penghasil olahan ikan asin yang melimpah, hampir setiap rumah warga di halamannya pasti ditemui hamparan ikan asin yang sangat banyak	0.04	3.00	0.12
7.	Terdapat ekowisata mangrove, selain ekowisata juga terdapat pengembangan olahan makanan berbahan dasar buah mangrove. Seperti syrup, dodol, dan pudding dari buah mangrove	0.06	4.00	0.24
8	Terdapat wisata pantai Olo di kawasan Bagan Deli	0.06	4.00	0.24
	Sub Total	0.50		1.61

Berikut adalah faktor kelemahan yang terdapat pada Kecamatan Medan Belawan:

Tabel. 2
Kelemahan (Weakness)

Faktor Internal				
No	Kelemahan (Weakness)	Bobot	Rating	(B)X(R)
1.	Pendidikan formal masyarakat pada usia produktif dikeluarga rendah	0.06	4.00	0.24
2.	Struktur masyarakat yang terbiasa dengan memperoleh pendapatan secara instan melalui aktivitas melautnya, sehingga tidak sabar dengan proses	0.03	2.00	0.06
3.	Belum memiliki budaya dan wawasan yang dibutuhkan untuk pengembangan wisata pantai	0.05	3.00	0.15
4.	Ekonomi keluarga mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam laut	0.04	4.00	0.16
5.	Masyarakat belum mengenal potensi pesisir di bawah laut yang media olahan dan peningkatan ekonomi keluarga	0.05	4.00	0.20
6.	Masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya ekonomi untuk mengembangkan ekonomi keluarga (permodalan, pemasaran, teknologi produksi, dll)	0.06	4.00	0.24
7.	Masyarakat lokal menolak untuk direlokasi ke wilayah yang bebas dari dampak banjir rob dan lebih berpotensi untuk pengembangan ekonomi keluarga	0.04	3.00	0.16
8.	Beberapa wilayah cenderung kumuh dan kotor karena dampak banjir rob	0.06	5.00	0.30
9.	Terdapat wilayah darurat sampah yakni pada Kelurahan Belawan Bahari	0.06	4.00	0.24
10.	Terdapat wilayah dengan angka kriminalitas yang tinggi yakni pada kelurahan Bagan Deli	0.05	4.00	0.20
	Sub total	0.50		1.95
	Total	1		3.56

Berikut adalah faktor peluang yang terdapat pada Kecamatan Medan Belawan:

Tabel. 3
Peluang (Opportunity)

Faktor Eksternal				
No	Peluang (Opportunity)	Bobot	Rating	(B)X(R)
1.	Terdapat 48 perusahaan swasta di Kecamatan Medan Belawan yang dapat dimanfaatkan dana	0.15	4	0.60

CSR-nya

2.	Visi dan misi Walikota Medan <i>concern</i> terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	0.15	4	0.60
3.	Memiliki potensi lahan untuk dijadikan <i>foodcourt</i> wisata pantai laut (wilayah kampar)	0.08	2	0.16
4.	Banyak LSM, komunitas atau instansi lainnya yang terlibat dalam pembangunan ekonomi masyarakat pesisir	0.10	3	0.30
5.	Kecamatan Medan Belawan merupakan kawasan pelabuhan, sehingga arus lalu lintas manusia, barang dan jasa intens terjadi	0.07	3	0.21
Sub total		0.55		1.87

Berikut adalah faktor ancaman pada Kecamatan Medan Belawan:

Tabel. 4
Ancaman (Threat)

Faktor Eksternal				
No	Ancaman (Threat)	Bobot	Rating	(B)X(R)
1.	Intensitas terjadinya banjir rob yang datang sudah tidak terprediksi lagi (<i>unpredictable</i>), pada waktu-waktu tertentu terjadi hampir setiap hari	0.20	5	1.00
2.	BUMN atau perusahaan-perusahaan besar yang ada dilingkungan Kecamatan Medan Belawan tidak sepenuhnya konsen terhadap pengembangan ekonomi masyarakat lokal	0.15	3	0.45
3.	Resto-resto wisata kuliner yang tersedia banyak dikelola oleh pengusaha-pengusaha elit, tidak berbasis UMKM	0.10	3	0.30
Sub total		0.45		1.75
Total		1		3.62

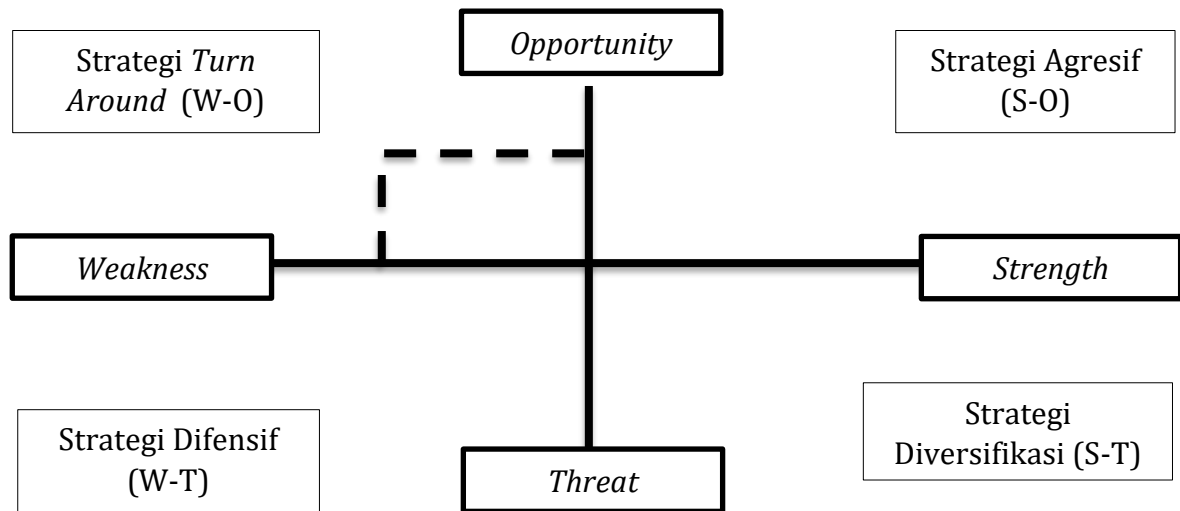
Setelah didapat nilai total dari masing-masing faktor bagian selanjutnya adalah menggambarkan dalam rumusan matrik SWOT, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel. 5
Rumusan Matrik SWOT

Keterangan	<i>Strength</i>	<i>Weakness</i>
<i>Opportunities</i>	Strategi (S-O) 1.61+1.87 = 3.48	Strategi (W-O) 1.95+1.87 = 3.82
<i>Threats</i>	Strategi (S-T) 1.61+1.75 = 3.36	Strategi (W-T) 1.95+1.75 = 3.70

Berikut adalah gambar diagram *Cartesius* kuadran analisis SWOT:

Gambar 1
Diagram Cartesius



Strategi yang dapat dilakukan terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir di Kota Medan Berbasis Hasil Analisis SWOT

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas, telah diperoleh kuadran yang harus dipriorotaskan untuk dikelola, dengan tanpa mengabaikan sisi-sisi yang lain. Maka dari itu, strategi yang disusun untuk optimalisasi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Kota Medan adalah dengan memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan, sebagaimana yang tertera pada tabel berikut:

Tabel. 6
Strategi SWOT

	<i>WEAKNESS/KELEMAHAN</i>	<i>OPPORTUNITY/PELUANG</i>	STRATEGI
INTERNAL	<p>Pendidikan masyarakat pada usia produktif rendah Struktur masyarakat yang terbiasa dengan memperoleh pendapatan secara instan melalui aktivitas melautnya, sehingga tidak sabar dengan proses</p> <p>Belum memiliki budaya dan wawasan yang dibutuhkan untuk pengembangan wisata pantai</p>	<p>Terdapat 48 perusahaan berskala besar di Kecamatan Medan Belawan yang dapat dimanfaatkan dananya</p> <p>Visi dan misi Walikota Medan <i>concern</i> terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir</p>	<p>a) Pemko mendorong terlaksananya pendidikan yang menyeluruh melalui bantuan sekolah maupun beasiswa jenjang perguruan tinggi.</p> <p>b) Pemko, LSM, atau Lembaga-lembaga potensial mendukung terciptanya SDM yang berkualitas melalui pemberian pelatihan</p>

EKSTERNAL	Ekonomi keluarga mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam laut		peningkatan <i>skill</i> atau keterampilan seperti berwirausaha.
	Masyarakat belum mengenal potensi pesisir di bawah laut yang media olahan dan peningkatan ekonomi keluarga	Memiliki potensi lahan untuk dijadikan <i>foodcourt</i> wisata pantai laut (wilayah kampar)	LSM bekerja sama dengan BUMN atau perusahaan swasta untuk melaksanakan program pemberdayaan berbasis ekowisata pantai dan kelautan
	Masyarakat lokal menolak untuk direlokasi ke wilayah yang bebas dari dampak banjir rob dan lebih berpotensi untuk pengembangan ekonomi keluarga		
	Masyarakat lokal menolak untuk direlokasi ke wilayah yang bebas dari dampak banjir rob dan lebih berpotensi untuk pengembangan ekonomi keluarga	Banyak LSM, komunitas atau instansi lainnya yang terlibat dalam pembangunan ekonomi masyarakat pesisir	LSM bekerja sama dengan BUMN atau perusahaan swasta untuk membentuk Program Pemberdayaan kaum perempuan
Beberapa wilayah cenderung kumuh dan kotor karena dampak banjir rob			
Terdapat wilayah darurat sampah yakni pada Kelurahan Belawan Bahari	Kecamatan Medan Belawan merupakan kawasan pelabuhan, sehingga arus lalu lintas manusia, barang dan jasa intens terjadi	Penggunaan teknologi untuk mendaur ulang sampah agar bernilai ekonomi dan mengurangi pencemaran	
Terdapat wilayah dengan angka kriminalitas yang tinggi yakni pada kelurahan Bagan Deli			

Kesimpulan

Pembangunan ekonomi yang berhasil membutuhkan peningkatan fungsi sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil. Masing-masing memiliki kelemahan serius yang harus diatasi. Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada sektor swasta yang dinamis dan sektor publik yang efisien, tetapi juga pada sektor masyarakat sipil yang kuat (Todaro & Smith, 2015).

Sejalan dengan hasil penelitian di atas, bahwasanya sinergi dari ketiga sektor (negara, swasta, dan masyarakat sipil) penting untuk dimaksimalkan, demi terwujudnya pembangunan ekonomi masyarakat. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, LSM *Human Initiative* Sumut didukung oleh PT. Pertamina telah menyelenggarakan program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Kota Medan. Selaras dengan hal tersebut, visi misi pemerintah Kota Medan adalah memprioritaskan pemberdayaan ekonomi pada masyarakat pesisir. Maka dari itu, Pemerintah Kota Medan, Swasta, dan LSM, diharapkan dapat mengonstruksi pembangunan ekonomi masyarakat Kota Medan menjadi lebih maju dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, & Savitri, E. (2016). Peran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir. *Repositiry UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, 1998, 1–118.
- Badawi, A. A., & Abdullah, Y. A. (2022). Effectiveness of Ngos' Initiatives in Facilitating Drm Efforts for the Vulnerable Communities in Egypt. *Journal of Sustainability Science and Management*, 17(3), 198–212. <https://doi.org/10.46754/jssm.2022.03.016>
- BPS. (2022). *Jumlah Penduduk Miskin*. BPS Kota Medan. <https://medankota.bps.go.id/indicator/23/88/1/jumlah-penduduk-miskin.html>
- Dahie, A. M. (2019). Role of Nongovernmental Organizations on Poverty Reduction: Empirical Study From Local Ngos in Mogadishu-Somalia. *European Journal of Research in Social Sciences*, 7(1), 43–55. www.idpublications.org
- DPRI. (2007). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil*.
- Enyioko, N. C. (2013). Role of Non-Governmental Organizations (NGOs) in Rural Development: A Study of the Six Listed NGOs in Rivers State, Nigeria. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2178989>
- I Gede Made, Subagiana, Artatanaya, I. G. L. S., & Wijayati, N. L. M. (2018). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) pada Tiga Perkampungan Nelayan Air Kuning, Pengambengan dan Candi Kusuma Kabupaten Jembrana Propinsi Bali (Suatu Studi Komparatif). *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 14(2), 92–98. <https://doi.org/10.31940/jbk.v14i2.1042>
- Idrus, A., Rapanna, P., Anto, H., & Sahribulan. (2018). *Empowerment Of Communities Coast To Strengthening The Economy In South Sulawesi, Indonesia*. 7(2), 485–492.
- Initiative, H. (2020). *Human Initiative Sumatera Utara*. <https://human-initiative.org/office/pkpu-human-initiative-sumatera-utara/>
- Lomboan, D. V. Y., Ruru, J., & Londa, V. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa Kumu Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(102), 28.
- Mlambo, D. N., Edmund Mpanza, S., & Abednico Mubecua, M. (2021). Non-Governmental Organizations (NGOs) and the South African Development Agenda Post Democratization: An Appraisal. *African Journal of Development Studies (Formerly AFFRIKA Journal of Politics, Economics and Society)*, Si(1), 183–198. <https://doi.org/10.31920/2634-3649/2021/sin1a10>
- Nega, B., & Schneider, G. (2014). NGOs, the State, and Development in Africa. *Review of Social Economy*, 72(4), 485–503. <https://doi.org/10.1080/00346764.2014.958901>
- Osiobe, E. U., Osiobe, S. A., & State, D. (2019). The Role of Non-Governmental Organizations in Community Economic Development: Using a System Dynamic

- Approach. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 10(20), 1–11. <https://doi.org/10.7176/jesd/10-20-01>
- Pariangu, U. T. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Pemp) Di Kabupaten Kupang*. 13(3), 307–325.
- Phoek, I. C. A. (2021). *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Merauke Daerah*. 14–19.
- Rostin. (2016). The Effect of Economic Empowerment of the Coastal Communities and Social Capital on Coastal Community Welfare. *The International Journal of Engineering And Sciences (IJES)*, 5(2), 12–18.
- Roy, Ishita; Tanzil, Al Raquib; Amit, K. S. (2017). Contribution of NGOs for Socio-Economic Development in Bangladesh. *Science Journal of Business and Management*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.11648/j.sjbm.20170501.11>
- Rukin, B. (2022). *Economic Empowerment Model of Coastal Communities*. 22(3).
- Setiabudi, F., Herawati, D., Purnomo, J., & ... (2018). Coastal Community Empowerment Management of Anchovy (*Stolephorus Spp*) Fishery in Saramaake, North Moluccas Province, Indonesia: Need Assessment *Journal of Community ...*, 11(3), 39–55. <https://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/view/Vol-11-No-3-2018-39-55%0Ahttps://www.journal.nu.ac.th/JCDR/article/download/Vol-11-No-3-2018-39-55/1367>
- Sutarto, D. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Keluarga Persepektif Gender Dendi Sutarto Pendahuluan Dewasa ini masyarakat Batam dan pesisir Batam khususnya dihadapkan pada persoalan yang cukup rumit yaitu pengangguran , ketimpangan sosial dan ekonomi khusus (. *Politika, Jurnal Trias*, 2(2), 267–283.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Ekonomis Perkembangan* (Edisi ke-1). PEARSON Education. Inc.
- Utsalina, D. S., & Primandari, L. A. (2020). Analisis SWOT Dalam Penentuan Strategi Pemasaran menggunakan Analytic Network Process. *Antivirus: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika*, 14(1), 41–50.